

Akuntabilitas Keuangan dan Kompetensi Aparatur Sipil Negera Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru

Fachroh Fiddin¹

¹Politeknik Negeri Bengkalis

email: fachroh1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine the effect of the application of financial accountability and employee competence on the performance accountability of government agencies at the Pekanbaru City Trade and Industry Office. The research respondents of this study were all civil servants at the Pekanbaru City Trade and Industry Office. The data used in this study were obtained from individual perceptions regarding the application of financial accountability, employee competence and accountability for the performance of government agencies in the Department of Trade and Industry in Pekanbaru City. The data obtained after distributing the questionnaire were 81 people. Data analysis using multiple regression techniques supported by secondary data. The results showed that the application of financial accountability had no effect on the accountability of the performance of government agencies and the competence of employees either simultaneously or partially had an effect on the accountability of the performance of government agencies.

Keywords: financial accountability, employee competence, and performance accountability of government agencies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Responden penelitian dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai negeri sipil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari persepsi individu mengenai penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi pegawai dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh setelah penyebaran kuesioner yaitu 81 orang. Analisa data menggunakan teknik regresi berganda yang didukung dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kompetensi pegawai baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: akuntabilitas keuangan, kompetensi pegawai, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Adanya laporan kinerja dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi

pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja atau capaian prestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Laporan kinerja instansi pemerintah juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di masa akan datang dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Adanya peraturan presiden ini mengharuskan setiap instansi dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharuskan melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan konsep *good governance* telah dilaksanakan di pemerintah.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000).

Sebagai wujud pelaksanaan reformasi terutama dalam pengelolaan keuangan, pemerintah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya dalam rangka melaksanakan tuntutan masyarakat dibidang keuangan yaitu transparansi mengenai penggunaan sumber-sumber keuangan yang dilakukan pemerintah kepada publik.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas itu sendiri. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan, 2010).

Kompetensi aparatur sipil negara yang baik akan menentukan kemajuan organisasi pemerintahan sehingga akan mendorong pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas sebagai jawaban tuntutan publik terhadap akuntabilitas di pemerintahan.

Tingkat akuntabilitas sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru masih tergolong rendah. Hal dapat dilihat laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementrian PANRB dimana pemerintah kota pekanbaru meraih prediket CC (Cukup Baik) dengan nilai 54,68.

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pengaruh akuntabilitas keuangan dan kompetensi aparatur sipil negara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul, 2002:8).

Mardiasmo (2002:31), mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya Akuntabilitas dan *Good Governance* (2000:24), membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

- a. Integritas Keuangan
- b. Pengungkapan
- c. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu *restopektif* dan *prospektif*. Peran *restopektif* terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran *prospektif* terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral,

etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pengertian kompetensi menurut Robbins (2007:38) bahwa kompetensi adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 2014 pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja menurut (LAN & BPKP, 2000) mendefinisikan akuntabilitas kinerja adalah suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN, 2004, hal. 63). Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Komponen dalam

SAKIP ini menceminkan semua proses yang ada dalam manajemen kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

3. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan dan kompetensi aparatur sipil negara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rincian populasi penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	81 Orang
Jumlah Populasi		81 Orang

Sumber : data yang diolah tahun 2019

Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh pegawai yang bekerja dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Teknik penentuan sampel menggunakan *Judgment sampling* dimana metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai kriteria peneliti.

Data yang digunakan yaitu data primer. Dimana data yang diperoleh dengan metode kuesioner mengenai akuntabilitas keuangan dan kompetensi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel independen yang digunakan yaitu akuntabilitas keuangan dan kompetensi pegawai sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Penerapan akuntabilitas keuangan diartikan sebagai penerapan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dimana pertanggungjawaban ini mengenai laporan keuangan yang disajikan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan apakah telah sesuai prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (Soleman, 2007:156). Variabel penerapan akuntabilitas keuangan menggunakan 2 dimensi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yaitu tanggung jawab dan nota keuangan.

Kuesioner yang digunakan dalam variable penelitian ini menggunakan skala likert dengan menggunakan instrument dari Soleman (2007). Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban ekstrim negatif dan nilai 5 untuk jawaban ekstrim positif.

Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai merupakan suatu karakteristik dasar dan kemampuan-kemampuan yang unggul dari individu pegawai yang meliputi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan perilaku (sikap) yang dapat digunakan individu untuk mencapai kinerja maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Variabel kompetensi pegawai di formulasikan menjadi 4 (empat) dimensi yaitu pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung-jawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja pada dasarnya meliputi tahap 1) Penetapan perencanaan strategik, 2) Pengukuran kinerja, 3) Pelaporan kinerja, 4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Secara umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 09 september 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dimana terjadi penggabungan dua SKPD yaitu Dinas Pasar dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi satu OPD. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Uji validitas dan Realibilitas

Penelitian melibatkan keseluruhan pegawai yang bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang berjumlah 72 orang dari populasi sebanyak 81 orang.

Data dikatakan valid angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari angka

kritik ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$). Adapun $r \text{ tabel}$ pada penelitian ini yaitu $N-2$ ($N=\text{Sampel}$) $= 72-2 = 70$ dengan taraf signifikan 5%. Dari tabel didapat angka 0,1954.

Tabel 2. Hasil uji validitas

Variabel	Item pertanyaan	R hitung	R tabel	keterangan
Akuntabilitas keuangan	PAK 1	0,867	0,1954	Valid
	PAK 2	0,575	0,1954	Valid
	PAK 3	0,869	0,1954	Valid
	PAK 4	0,712	0,1954	Valid
	PAK 5	0,601	0,1954	Valid
	PAK 6	0,363	0,1954	Valid
Kompetensi pegawai	KP 1	0,781	0,1954	Valid
	KP 2	0,339	0,1954	Valid
	KP 3	0,122	0,1954	Tidak
	KP 4	-0,153	0,1954	Valid
	KP 5	0,445	0,1954	Tidak
	KP 6	0,453	0,1954	Valid
	KP 7	0,670	0,1954	Valid
	KP 8	0,644	0,1954	Valid
	KP 9	0,441	0,1954	Valid
	KP 10	0,397	0,1954	Valid
	KP 11	0,503	0,1954	Valid
	KP 12	0,739	0,1954	Valid
Akuntabilitas kinerja instansi	AKP1	0,639	0,1954	Valid
	AKP2	0,126	0,1954	Tidak
	AKP3	0,816	0,1954	valid
	AKP4	0,884	0,1954	Valid
	AKP5	0,791	0,1954	Valid
	AKP6	0,832	0,1954	Valid
	AKP7	0,869	0,1954	Valid

Sumber : data primer yang diolah,2019

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa item pertanyaan yang tidak valid pada variabel kompetensi pegawai yaitu item pertanyaan KP3 dan KP4. Sedangkan untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah item pertanyaan yang tidak valid yaitu AKP2. Beberapa item pertanyaan yang tidak valid dibuang dan tidak diikutkan pada proses pengolahan data selanjutnya.

Untuk uji reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Reliabel/tidak reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,774	Reliabel
Kompetensi Pegawai	0,719	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah	0,889	Reliabel

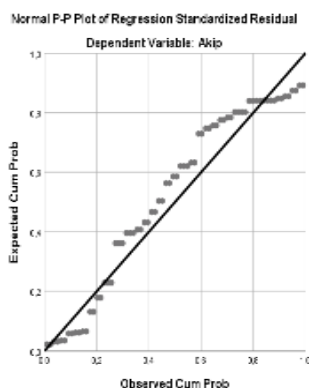
Sumber : data primer yang diolah, 2019

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6.

Dari tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa semua instrumen variabel yang digunakan dalam penelitian ini > 0,6 dan dapat dikatakan *reliabel*.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil grafik dari uji normalitas dalam penelitian dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini:



Sumber : data primer yang diolah, 2019

Hasil pengujian normalitas menunjukkan grafik normal plot model regresi diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal dan grafik normal plot tersebut membentuk garis lurus dari sisi kiri bawah kekanan atas

sesuai dengan teori linearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa linearitas dalam model regresi ini sudah dipenuhi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan antara variabel independen (penerapan akuntabilitas keuangan dan kompetensi pegawai) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

Dari uji ANOVA atau F test pada tabel diatas didapat nilai F hitung sebesar 5,702 dengan probabilitas 0,005. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi perbedaan yaitu penerapan akuntabilitas keuangan dan kompetensi pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh akuntabilitas keuangan dan kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependent. Hasil uji t dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil uji t

No	Variabel	Sig	%	Keterangan
1.	Akuntabilitas keuangan	0,175	0,05	H1 ditolak
2.	Kompetensi Pegawai	0,002	0,05	H1 diterima

Sumber : data olahan SPSS,2019

Dari hasil uji t pada tabel diatas dapat disimpulkan:

1. Variabel akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat dilihat hasil output SPSS, akuntabilitas memiliki tingkat signifikan 0,175 > 0,05.

2. Variabel kompetensi pegawai secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat dilihat tingkat signifikan yang diperoleh dari hasil olah data SPSS yaitu 0,002.

Dari hasil uji diatas dapat diketahui dinas perindustrian belum ada usaha yang signifikan dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian terhadap penerapan akuntabilitas keuangan sedangkan dalam hal kompetensi pegawai pemerintah kota pekanbaru telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa belum maksimal upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan.
2. Variabel kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hasil ini menunjukkan kompetensi aparatur sipil negara pada lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru seperti adanya pelatihan-pelatihan, seminar, maupun simposium terhadap pegawai dapat menunjang kinerja pegawai tersebut.

Adapun saran atau masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu:

1. Melakukan upaya lebih dalam bidang keuangan, seperti mengadakan pelatihan lebih lanjut pada bidang anggaran maupun keuangan dan menyatukan persepsi bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas khususnya dibidang keuangan pada pemegang kebijakan di instansi tersebut.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya membuat sebuah sistem yang dapat memacu pemegang kebijakan disetiap organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan penerapan akuntabilitas keuangan di instansi mereka pimpin, seperti *punishment dan reward* bagi organisasi perangkat daerah yang mendapat nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi dibawah standar yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Bambang Pamungkas.2005. *Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Penerapan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Disertasi UNPAD Bandung. Tidak dipublikasikan.
- Chairullah, Abd. Wahid.2004. *Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas di Lingkup Pertanian dan Kabupaten Sampang*. Tesis PSDM Universitas Airlangga Surabaya.
- Ghozalie, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program*

- SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Gistyan, Rico. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Kompetensi Pegawai terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura)*. Tesis
- Inpres No. 7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP. 2000. *Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPK, 2000, *Akuntabilitas dan Good Government*, Jakarta: Tim Asistensi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, *tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Republik Indonesia*
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Riantiarno, Reynaldi, and Nur Azlina. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)." *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)* 3.03 (2012).
- Suprpto. 2002. *Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Menuju Era Global*. Dalam Seri Kertas Kerja Volume II Nomor 05. Pusat Penelitian dan Pengembangan BKN, Jakarta
- www.bpkp.go.id
- www.menpan.go.id